



**Penguatan Kelembagaan BUMDes Usaha Bersama Desa Pilolahunga
Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan**

Jois Nurdin¹, Ramli Mahmud², Rasid Yunus³, Zulfikar Adjie⁴

PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia^{1,2,3,4}

E-mail: joisnurdin@gmail.com¹, ramlimahmud33@ung.ac.id², rasidyunus@ung.ac.id³,
zulfikaradjie@ung.ac.id⁴

Abstrak

Keberadaan BUMDes di Desa Pilolahunga dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir sejak diluncurkan ADD belum efektif dalam pengembangan ekonomi masyarakat desa. Desa yang memiliki sumber daya alam luar biasa namun belum tersentuh dengan pemanfaatan dalam segi pengelolaannya. BUMDes sering mengalami kemandekan dari segi pengelolaan. Hal ini bisa saja terjadi karena pengelolaan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sumber daya desa serta kelembagaannya yang belum maksimal. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menggali dampak keberadaan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berada di desa Pilolahunga. Berangkat dari hal tersebut maka, metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sosialisasi tentang penguatan kelembagaan BUMDes berbasis potensi desa. Dimana kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi terhadap kelompok kepentingan yang ada di desa tersebut. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan keberadaan dari BUMDes tidak dapat dipungkiri bahwa dapat membawa perubahan dibidang ekonomi dan sosial bagi masyarakat desa. Desa Pilolahunga sendiri memiliki potensi sumber daya yang bisa dikembangkan untuk menjadi produk ekonomi kreatif masyarakat, diantaranya perikanan (nelayan tangkap dan penampung ikan), perkebunan cabe, cengkeh serta sumber air yang melimpah bisa dijadikan sebagai kekuatan ekonomi desa dalam pengelolaan BUMDes. Maka dari itu, perlu adanya peran dari BUMDes untuk dapat mengelola potensi yang berada di desa tersebut.

Kata kunci : penguatan, kelembagaan, BUMDes, Pilolahunga

Abstract

The existence of BUMDes in Pilolahunga Village in the last few years since the launch of ADD has not been effective in developing the village community's economy. Villages that have extraordinary natural resources but have not been touched by utilization in terms of management. BUMDes often experience stagnation in terms of management. This can happen because the management has not been in accordance with the needs of the community and village resources and institutions have not been maximized. This service activity aims to explore the impact of the existence of Village Owned Enterprises (BUMDes) in Pilolahunga village. Departing from this, the method used in the implementation of this activity is the socialization of strengthening BUMDes institutions based on village potential. Where this service activity is carried out in the form of socialization to interest groups in the village. The results of this service show that the existence of BUMDes cannot be denied that it can bring changes in the economic and social fields for rural communities. Pilolahunga Village itself has potential resources that can be developed to become a product of the community's creative economy, including fisheries (fishermen and fish catchers), chili plantations, cloves and abundant water sources that can be used as village economic strength in BUMDes management. Therefore, there is a need for the role of BUMDes to be able to manage the potential in the village.

Keywords : strengthening, institutional, BUMDes, Pilolahunga

Copyright (c) 2022 Jois Nurdin, Ramli Mahmud, Rasid Yunus, Zulfikar Adjie

✉ Corresponding author

Address : Universitas Negeri Gorontalo

Email : zulfikaradjie@ung.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i2.578>

ISSN 2721- 9224 (Media Cetak)

ISSN 2721- 9216 (Media Online)

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa yang disebut dengan desa adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak ulayat dan berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangga desa tanpa campur tangan dari pihak manapun. Atas hal tersebut, salah satu agenda prioritas pembangunan desa adalah melalui pengembangan kekuatan ekonomi masyarakat desa, sebab pada kebijakan strategi dalam pembangunan nasional dimulai dari pembangunan yang berada di desa. Sebagaimana dalam konsep pembangunan bahwa perputaran dari suatu keadaan nasional yang lain, yang dapat dipandang lebih baik dan lebih berharga. (Alfiaturrahman P. , 2016).

Prioritas tersebut dapat dilihat dari tuntutan atas regulasi dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang desa yang mewajibkan kepada pemerintahan desa dalam mengalokasikan dana desa untuk kegiatan ekonomi produktif desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Artinya keberadaan BUMDes (badan Usaha Milik Desa) merupakan suatu lembaga perekonomian yang berada di desa yang memiliki badan hukum yang kuat serta dimiliki oleh pemerintah desa, yang dikelola secara langsung dan mandiri dengan modal seluruhnya atau sebagian dari hasil kekayaan yang dimiliki oleh desa guna memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes). (Dewi, 2014)

Hal demikian pada pengaturan BUMDes telah diatur pada pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, menjelaskan bahwa desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dari potensi desa yang ada. Sehingga tujuan

dari BUMDes yaitu dapat memaksimalkan pengelolaan potensi ataupun aset-aset dari desa tersebut, guna dapat memajukan perekonomian serta dapat menambah kesejahteraan masyarakat Desa. Mengenai peran dari pemangku kepentingan, dalam beberapa tahun ini, pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sangat antusias dalam pengembangan BUMDes. Salah satu agenda prioritas pemerintah daerah adalah pengembangan produk minyak kampung. Namun hingga pada saat ini agenda tersebut belum dilaksanakan dengan baik.

Hal ini dikarenakan setiap desa memiliki potensi sumber daya yang berbeda sehingga mengakibatkan apa yang menjadi sasaran dari pemerintah daerah belum sepenuhnya diindahkan oleh pemerintah desa bersama BUMDesnya. Apa yang menjadi hambatan tersebut di atas juga dialami oleh pemerintah desa dan pengelola BUMDes Usaha Bersama Desa Pilolahunga. Selain itu juga, hal yang sangat menggerogoti masalah dari keberadaan BUMDes adalah tidak sinkronnya kepentingan dari pemerintah desa dengan pengurus BUMDes (Gunawan, 2011).

Kemudian permasalahan lain yang berada di desa Pilolahunga adalah kurangnya pemberian penguatan kelembagaan BUMDes dalam mengelola potensi desa, hal ini dikarenakan perumusan dan penetapan program BUMDes secara signifikan belum memprioritaskan potensi desa, tentunya hal ini juga sangat berpengaruh terhadap kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program BUMDes. Selain itu, sering terjadi konflik kepentingan antara pemerintah desa dan pengurus BUMDes Usaha Bersama membuat beberapa program mengalami kemandekan.

Berangkat dari hal ini pengabdian masyarakat yang dilaksanakan ini bertujuan untuk mengatasi masalah yang sering terjadi, sehingganya dalam pengelolaan BUMDes dapat berjalan sesuai harapan bersama, guna tercapainya kesejahteraan dari masyarakat.

METODE

Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian pada masyarakat ini yakni menggunakan metode berupa pemberian pendidikan terhadap masyarakat atau sosialisasi tentang Penguatan kelembagaan BUMDes dengan peserta ialah tokoh pemangku kepentingan yang berada di Desa Pilolahunga. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan oleh Dosen yang berkolaborasi dengan Mahasiswa Program Studi S1 PPKn FIS-UNG serta bekerja sama dengan Pemerintah Desa Pilolahunga Kecamatan Posigadan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Sosialisasi ini dilaksanakan oleh Program Studi S1 PPKn Fakultas Ilmu Sosial-UNG, pada tanggal 12 Oktober 2021 bertempat di aula kantor Desa Pilolahunga Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Kegiatan Sosialisasi tentang Penguatan Kelembagaan BUMDes usaha bersama Desa Pilolahunga ini dilaksanakan guna menghasilkan satu tujuan yakni berjalannya dengan baik Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berada di Desa Pilolahunga, agar dapat mengelola potensi desa yang ada.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi

Desa menjadi ujung tombak pembangunan Indonesia. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya mendorong ekonomi desa dengan penyaluran Dana Desa dan Program Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tujuan BUMDes seperti dalam Permendesa PDT dan Transmigrasi No. 40/2015 adalah, meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.

Dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa Pilolahunga Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan belum terselenggarakan dengan baik. Diantara masalah yang dihadapi adalah banyaknya potensi dari desa yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Pilolahunga Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Atas masalah tersebut, hasil yang telah

dicapai dalam kegiatan pengabdian ini yakni sebagai berikut :

1. Terciptanya kesadaran dari masyarakat setempat terhadap potensi perekonomian desa yang berada di Desa Pilolahunga Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Membangun hubungan kerjasama antara Desa Pilolahunga Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan mengembangkan usaha hasil kreativitas Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan.



Gambar 2. Peserta Sosialisasi

Berdasarkan pada capaian hasil pengabdian yang dilaksanakan di Desa Pilolahunga Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, rekomendasi dalam pengabdian ini meliputi:

1. Perlu adanya edukasi dan penguatan melalui pelatihan terhadap masyarakat setempat Desa Pilolahunga Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam penguatan kelembagaan BUMDes .

2. Melalui pemerintah desa pilolahunga, menginisiatif pengelolaan sumber daya tata kelola BUMdes melalui penguatan berupa sosialisasi dan penyuluhan serta pelatihan tata kelola Sumber Daya yang dihasilkan Desa tersebut.

SIMPULAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berada di Desa Pilolahunga Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dimaksudkan untuk lebih mengarahkan dan mengoptimalkan pengelolaan usaha milik desa dengan sumber daya yang mereka miliki contohnya seperti Serabut Kelapa, karena pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan ataupun potensi Desa yang bersangkutan. Keberhasilan dari usaha BUMDes sangat bergantung kepada bagaimana orang-orang yang termasuk dalam kelembagaan keanggotaan BUMDes mengelola sumber daya yang ada.

UCAPAN TERIMAH KASIH

Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, kami Dosen dan Mahasiswa Prodi S1 PPKn FIS-UNG mengucapkan terimah kasih kepada Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat UNG, Fakultas Ilmu Sosial UNG, Pemerintah dan masyarakat Desa Pilolahunga Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi tentang penguatan kelembagaan BUMDes, sebab tanpa bantuan,

293 *Sosialisasi Penguatan Kelembagaan BUMDes Usaha Bersama Desa Pilolahunga Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan – Jois Nurdin, Ramli Mahmud, Rasid Yunus, Zulfikar Adjie*
DOI: <https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i2.578>

dukungan, dan doa dari pihak terkait, kegiatan sosialisasi ini tidak dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR ISI

- Alfiaturrahman, P. (2016). Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. *Journal Universitas Islam Riau*.
- Dewi, A. S. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Journal Of Rural And Development*.
- Gunawan, K. (2011). “Manajemen Bumdes Dalam Rangka Menekan Laju Urbanisasi.”. *Widyatech Jurnal Sains Dan Teknologi*. Volume 10 Nomor 3, 61-72.
- Rahmola. 2020. Pengelolaan Dana Desa “Studi Eefektifitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Pilolahunga” Skripsi. Repositry UNG
- UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 213 (1) Tentang Badan Usaha Milik Desa